

Judul : Mau jadi Pulau Organik, Bali bikin pertanian ramah lingkungan
Tanggal : Jumat, 08 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Mau Jadi Pulau Organik Bali Bikin Pertanian Ramah Lingkungan



Endang Setyawati Thohari

ANGGOTA Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari menyokong langkah Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan wilayahnya sebagai Pulau Organik. Hal ini sejalan dengan agenda nasional dalam membangun sistem pertanian yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

Endang mengatakan, pertanian organik bisa menjawab tantangan ketahanan pangan, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan nilai-nilai adat Bali. Syaratnya, petani dibantu memperoleh subsidi dan insentif nyata dari Pemerintah.

"Petani perlu dibantu melalui pemberian benih unggul, pupuk, pestisida organik, serta sarana prapangan lain, dengan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah," kata Endang dalam kunjungan kerja ke Bali, baru-baru ini.

Endang juga menyoroti perlunya penguatan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, bendungan, dan embung, untuk menjamin ketersediaan air. Selain itu, pemda disarankan

memperluas akses pasar, pembiayaan, asuransi pertanian, dan fasilitasi ekspor.

"Produk pertanian dan perikanan Bali punya potensi ekspor besar. Pemerintah harus hadir aktif dalam mendukung proses ekspor dan membuka pasar luar negeri," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menambahkan, parlemen akan memperjuangkan Bali sebagai Pulau Organik.

Komisi IV akan mendorong penambahan kuota pupuk organik, penyaluran bantuan benih, pembangunan jalan usaha tani, serta penguatan sektor perikanan.

"Kami juga akan mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai pijakan pembangunan berkelanjutan Bali. Komitmen kami konkret, termasuk memperjuangkan kemudahan ekspor produk-produk organik Bali," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Alex, produk pertanian dan perikanan organik

Bali memiliki kualitas tinggi dan daya saing di pasar global. Karena itu, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan transformasi ini.

"Pemerintah Pusat tidak boleh abai. Akses pasar, permodalan, hingga infrastruktur pendukung harus diperluas untuk meningkatkan daya saing petani dan nelayan Bali," tambahnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas komitmen DPR itu. Menurutnya, pertemuan dengan Komisi IV menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dan perikanan Bali dari sistem konvensional menuju sistem hijau dan berkelanjutan. ■ PYB